



Manfaatkan QRIS, Antisipasi Parkir Nuthuk

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Wisatawan yang menjadi korban parkir nuthuk hampir tiap musim liburan selalu terjadi. Antisipasi sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, yaitu dengan pemanfaatan QRIS. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan,

telah memerintahkan dinas perhubungan untuk memperbanyak titik dengan metode pembayaran melalui QRIS. "Kami sudah menggunakan QRIS. Sudah ada 150 titik yang harus pakai QRIS," katanya. Tapi, hak tersebut tak akan efektif. Jika wisatawan tak menyadari masalah awal parkir

nuthuk, yaitu parkir di tempat larangan. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengimbau wisatawan untuk menggunakan parkir resmi. Karena memberikan kepastian tarif serta menjamin keamanan kendaraan. Ia menegaskan, area

parkir milik pemerintah telah dilengkapi regulasi tarif yang jelas dan pengawasan optimal. "Masyarakat dapat memilih fasilitas yang sesuai aturan. Jika menginginkan kepastian tarif dan keamanan, kami mengimbau masyarakat parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan parkir tepi jalan umum maupun Tempat Khusus Parkir (TKP) merupakan kewenangan Pemkot Yogyakarta. Wisatawan diharapkan patuh pada regulasi agar tidak sembarang memarkirkan kendaraan di titik-titik ilegal.

CC
 Kami sudah menggunakan QRIS. Sudah ada 150 titik yang harus pakai QRIS."

Hasto Wardoyo
 Wali Kota Yogyakarta

■ Baca MANFAATKAN... Hal II

Manfaatkan QRIS, Antisipasi Parkir Nuthuk

sambungan dari hal Joglo Jogja

Salah satu fasilitas yang telah disiapkan pemerintah adalah TKP Ketandan, yang kini memiliki kapasitas memadai untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Ini merupakan hasil relokasi dari parkir portabel Abu Bakar Ali dan telah ditata guna memenuhi kebutuhan parkir di kawasan itu. "Telah siap dimanfaatkan secara

optimal oleh masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan pengelolaan parkir roda empat di kawasan Kridosono, bekerja sama dengan PT Anindya Mitra Internasional (AMI). Pemerintah turut mendorong pemanfaatan layanan *shuttle* menggunakan becak listrik maupun bus

listrik milik PT AMI, agar masyarakat memperoleh alternatif transportasi yang nyaman dan ramah lingkungan.

Ni Made menuturkan, pengawasan petugas Dinas Perhubungan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada setiap titik secara bersamaan. Oleh karena

itu, partisipasi masyarakat melalui kesadaran kolektif menjadi hal penting dalam mewujudkan penataan parkir yang tertib.

"Kerja sama masyarakat sangat diperlukan, agar lingkungan perparkiran semakin aman, tertib dan memberikan citra positif bagi pariwisata DIY," tegasnya. (eri/sam/st)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005